

RENJA 2025

RENCANA KERJA BPBD

BPBD Nunukan

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang. Rencana Kerja ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sub kegiatan dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Sadan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Nunukan, 13 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ARIEF BUDIMAN, S.Pt. M.Si
NIP. 19721412 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 2

 C. Maksud dan Tujuan 3

 D. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
 Perangkat Daerah 5

 B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

 C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

 D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

 E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 38

 A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38

 B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 39

 C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

 A. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun
 2026 47

BAB V PENUTUP..... 56

DAFTAR TABEL

Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 6

Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Nunukan... 17

Tabel TC-31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Nunukan..... 26

Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .. 33

Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2025 43

Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi PD.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Rancangan awal Renja tahun 2025.
2. Renja tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan tahun 2006-2025 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan;
4. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Kabupaten Nunukan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
21. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah :

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini.
- b. Menyesuaikan rencana pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh suatu dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025) Di lampirkan dalam tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana		Presen	100	Presen	100	Presen	100	Presen		100	Presen			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen		100	Dokumen			
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	75
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	0
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	0
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	2	Laporan	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	100	14	Bulan	42	Bulan	62
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	Paket	5	Paket	2	Paket	5	Paket	250	5	Paket	15	Paket	68
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	36	Paket	60
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	0	Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	24	Paket	40
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	100	25	Laporan	75	Laporan	60
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintahan daerah		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	0	5	Unit	6	Unit	0
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	15	Unit	0	15	Unit	30	Unit	0
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	1	Unit	2	Unit	67
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	100	18	Unit	54	Unit	60
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100	3	Unit	9	Unit	60
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	0	Unit	2	Unit	50
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulangan Bencana		Presen	100	Presen	100	Presen	100	Presen		100	Presen			
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi rawan bencana		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	240	Orang	60	Orang	60	Orang	190	Orang	316,666667	60	Orang	310	Orang	129
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	0	Dokumen	1	Dokumen	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1	Kegiatan	3	Kegiatan	60
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	300	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	100	Unit	100	Unit	33
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	180	Orang	0	Orang	50	Orang	50	Orang	100	50	Orang	100	Orang	56
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	30	Keluarga	30	Keluarga	0
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2	Kawasan	0	Kawasan	0	Kawasan	0	Kawasan	0	1	Kawasan	1	Kawasan	50
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	10	Orang	10	Orang	50
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	50
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun														
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	laporan	75
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	0	Dokumen	2	Dokumen	0
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	225	Kawasan	45	Kawasan	25	Kawasan	20	Kawasan	80	40	Kawasan	105	Kawasan	47
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	3	Dokumen	3	Dokumen	0
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50	Orang	140	Orang	10	Orang	23	Orang	230	10	Orang	173	Orang	346
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	0
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	60	Orang	60	Orang	0
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	50	Orang	8	Orang	8	Orang	191	Orang	2387,5	8	Orang	207	Orang	414

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	3	Laporan	3	Laporan	0
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulungan Bencana		Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit		100	Unit			
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	75
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	75
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	30	Orang	30	Orang	0
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	15	Orang	15	Orang	0
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	1	Kegiatan	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	Lembaga	0	Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	100	1	Lembaga	2	Lembaga	0
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	0
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	50
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	0
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	Dokuman	0	Dokuman	0	Dokuman	0	Dokuman	0	1	Dokuman	1	Dokuman	0

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan:
Tidak tercapainya program/kegiatan tahun lalu disebabkan karena faktor lambatnya terealisasi anggaran oleh BPKAD selaku BUD melalui Surat penyediaan Dana (SPD) untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Faktor penyebab tercapainya target kinerja program dan kegiatan:
Program/kegiatan didukung dengan adanya Surat Penyediaan Dana (SPD).
- c. Faktor penyebab melebihnya target kinerja program dan kegiatan
Program/kegiatan sifatnya penting sehingga pihak BPKAD Kabupaten Nunukan selaku BUD mendukung dalam pemberian Surat Penyediaan Dana (SPD).

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dengan tidak dikeluarkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah:
Banyaknya program/kegiatan yang sifatnya pendukung terhadap kegiatan lainnya dan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya sehingga tidak mencapai target.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

Mengadakan sinkronisasi ke BUD untuk memberikan pemahaman akan pentingnya program/kegiatan yang mendukung percepatan penanggulangan bencana di Kabupaten Nunukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Tujuan BPBD Kabupaten Nunukan adalah **meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak bencana**. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah **mewujudkan Kabupaten Nunukan tangguh bencana dengan strategi melalui penyelenggaraan internalisasi prioritas pengurangan resiko bencana** yang dituangkan dalam:
 - a) Pelayanan informasi rawan bencana.
 - b) Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Untuk mewujudkan sasaran diatas, maka indikator sasaran yang ditetapkan sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan adalah **Persentase indeks prioritas bencana**. Formulasi dari Persentase indeks prioritas bencana adalah jumlah indeks prioritas bencana yang dicapai dibagi dengan jumlah indeks prioritas bencana yang harus dicapai kali seratus persen, atau dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah indeks prioritas bencana yang dicapai}}{\text{Jumlah indeks prioritas bencana yang harus dicapai}}$$

Dalam rangka mencapai IKU BPBD Kabupaten Nunukan, maka standar pelaksanaanya diukur dengan memprioritaskan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai berikut :

- 1. Persentase upaya Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
- 2. Persentase upaya Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 3. Persentase upaya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 4. Persentase upaya Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana

X 100%

Konsep dasar dalam mengukur Persentase upaya Pelayanan Informasi Rawan Bencana terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan kajian resiko bencana terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB
 - 2) Diskusi publik
- a. Sosialisasi, Komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana
 - 2) Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia
 - 3) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public

Konsep dasar dalam mengukur Persentase upaya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB
 - 2) Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal
- b. Pembuatan rencana kontigensi (RenKon) terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)

- 2) Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur
 - 2) Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Simulasi dalam ruang (*table top exercise*)
 - 2) Gladi lapang
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - 2) Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana
 - 3) Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*
 - 4) Penyediaan obat-obatan dan vaksin
 - 5) Tatalaksana/ pengobatan dan vaksinasi
 - 6) Penyediaan peralatan Kesehatan
 - 7) Penyediaan peralatan laboratorium
 - 8) Penyediaan layanan biosekuriti
 - 9) Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Penyediaan peralatan penyelamatan diri

Konsep dasar dalam mengukur Persentase upaya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

- a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari satu komponen, yaitu:
 - 1) Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana
- b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi
 - 3) Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

- 4) Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana
- c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana bantuan logistic untuk korban bencana
 - 2) Laporan akhir penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pencapaian kinerja program dan kegiatan menjelaskan upaya pelayanan yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sesuai penjelasan diatas dan disampaikan dalam tabel TC. 30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Nunukan

NO	Tujuan/ Sasarn/ Kinerja Kunci/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13
I	Tercapainya kondisi aman, tertib dan tentram	INDEKS KETAHANAN DAERAH (Indikator Tujuan PD)			0,4	0,42	0,43	0,45	0,47	0,56	0,45	0,47	IKU
II	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	PERSENTASE INDEKS PRIORITAS BENCANA (Indikator Sasaran Strategi PD)			47%	48%	50%	51%	53%	73%	51%	53%	IKU
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0	0	0	0	0	1	0	1	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0	0	0	0	0	0	0	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	0	0	0	0	1	0	1	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0	1	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14	14	14	14	14	14	14	14	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan			0	0	0	0	0	0	0	0	

		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5	5	5	5	5	5	5	5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25	25	25	25	25	25	25	25	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			0	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	0	0	0	1	0	0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0	0	0	0	15	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	1	1	1	1	0	1	1	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18	18	18	18	18	18	18	18	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3	3	3	3	3	3	3	3	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulangan Bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi rawan bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>	√		60	60	60	60	60	190	60	60	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	√		1	0	0	0	0	1	0	0	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	√		100	100	0	100	0	0	100	0	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>	√		40	40	50	50	50	50	50	50	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota (NON SPM)				1	1	1	1	1	0	1	1	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis			1	0	0	1	1	0	1	1	

		Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana											
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	√		10	0	0	10	10	0	10	10	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	√		1	0	0	1	1	0	1	1	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1	0	0	1	1	0	1	1	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	√		1	1	1	1	1	1	1	1	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	√		0	0	0	0	0	1	0	0	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	√		20	40	25	40	40	20	40	40	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	√		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	√		10	10	10	10	10	23	10	10	
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis			0	0	0	0	0	0	0	0	

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			10	10	10	10	10	191	10	10	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	√		0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	√		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	√		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan,			0	0	0	0	0	1	0	0	

		perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal											
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	√		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			0	0	0	0	0	0	0	0	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Tidak tercapainya program/kegiatan tahun lalu disebabkan karena faktor lambatnya terealisasi anggaran oleh BPKAD selaku BUD melalui Surat penyediaan Dana (SPD) untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Kurangnya Penyediaan bahan dan peralatan pada rekanan yang telah di tentukan.

2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap pencapaian program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan lambatnya terakomodirnya Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh BUD adalah:

- a. Dengan lambatnya terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) maka berdampak pada kurang terealisasinya program, kegiatan yang ditargetkan sesuai dengan rencana kerja.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan BPBD, perlunya menuntaskan permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan pendorong terlaksananya program-program kegiatan melalui analisa SWOT (*Strength Weakness Opportunities Threats*) dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Kekuatan (S : *Strengths*) :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 2) Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparatur
- 3) Dukungan *stakeholder* dalam penanganan penanggulangan bencana daerah
- 4) Komitmen dalam melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan.
- 5) Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi.
- 6) Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan ditingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam upaya penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana.
- 7) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana.

b. Kelemahan (W = *Weaknesses*):

- 1) Kualitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai

- 2) Keahlian dan ilmu pengetahuan aparaturnya belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
- 3) Tidak optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga system pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal yang disebabkan oleh COVID-19.
- 4) Masih terbatasnya pemberian anggaran oleh BPKAD selaku BUD melalui Surat penyediaan Dana (SPD) untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. **Peluang (O = *Opportunities*) :**

- 1) Adanya komitmen dari Kepala BNPB, Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Adanya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana;
- 3) Dukungan kebijakan Provinsi dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana
- 4) Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel
- 5) Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana.

d. **Ancaman (T = *Threats*):**

- 1) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 2) Terbatasnya pencairan anggaran yang tersedia di BPBD melalui Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam secara nasional maupun di daerah;
- 4) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

4. **Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024**

- a. Perlunya dukungan dari *stakeholder* yang membidangi anggaran khususnya BUD selaku pengambil kebijakan dalam proses Surat Penyediaan Dana (SPD) sehingga rencana kerja yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target kinerja.
- a. Dalam menyusun Renja tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (Satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD juga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya di akomodir di dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD sebagai dasar Penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatenn Nunukan merupakan pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Berikut tabel review rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang disajikan dalam bentuk tabel T-C.31 di bawah ini.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Nunukan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana	100	8.119.875.234	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana	100	8.664.536.915	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	194.792.360	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	162.626.770	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	99.502.660	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	82.462.070	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	14.989.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	14.989.750	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	13.030.950	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	13.030.950	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	41.889.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	26.764.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	25.380.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	25.380.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	4.620.420.399	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	5.285.254.994	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	4.611.720.099	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	5.276.554.694	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	8.700.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	8.700.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100	840.549.758	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100	834.905.664	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	410.974.614	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	419.820.497	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	129.999.644	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	165.435.667	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	49.549.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	49.549.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	250.026.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	200.100.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	215.509.597	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	563.019.031	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	108.225.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	199.744.500	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	107.284.597	Pengadaan Mebel	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	139.274.531	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	224.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100	1.118.854.320	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100	1.428.057.056	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100.576.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	127.754.736	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.018.277.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.300.302.320	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	1.129.748.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	390.673.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	370.643.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	351.143.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	399.105.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	39.530.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	360.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulangan Bencana	100	8.416.855.575	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulangan Bencana	100	6.676.533.069	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100	99.713.648	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100	75.042.437	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60	99.713.648	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60	75.042.437	SPM/LPPD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	-	SPM/LPPD
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	6.172.511.710	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	5.038.342.915	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	315.398.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	178.951.805	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	3.868.657.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100	3.713.135.000	SPM/LPPD
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	50	67.808.100	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	50	28.990.500	SPM/LPPD
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Nunukan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	103.098.370	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Nunukan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30	73.818.370	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Nunukan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0	70.986.750	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Nunukan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	53.322.750	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	0	60.020.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	10	52.990.000	SPM/LPPD
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	0	350.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1	350.000.000	SPM/LPPD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	-	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	1	1.216.123.330	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	1	505.422.330	SPM/LPPD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	0	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	0	-	SPM/LPPD
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	40	120.420.160	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	40	81.712.160	SPM/LPPD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	1.227.271.190	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	823.922.730	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang</i>	0	154.114.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang</i>	3	106.362.000	SPM/LPPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>					<i>Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>			
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	10	389.377.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	10	195.460.000	SPM/LPPD
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	98.424.160	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1	73.676.160	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	227.754.670	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60	102.703.810	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8	304.961.200	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8	293.080.600	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	0	52.640.160	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	3	52.640.160	SPM/LPPD
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	917.359.027	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	739.224.987	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	52.438.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	40.330.000	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	70.120.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	40.000.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	0	-	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	0	-	SPM
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	0	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	0	-	SPM
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	30	170.558.270	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki	0	54.167.310	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki	15	54.167.310	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)					kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)			
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	0	119.090.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	42.801.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1	149.717.497	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1	94.767.697	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	0	100.042.630	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kabupaten Nunukan	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	1	78.942.630	SPM
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	141.690.220	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	129.754.710	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	225.988.220	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	83.798.220	
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	4.105.150	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	4.105.150	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pola pikir penyusunan Renja diawali oleh kegiatan untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen dan pengerahan tenaga serta diikuti oleh pengumpulan data dan analisisnya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati. Dalam penyusunan Renja ini diperlukan tahap perumusan yaitu :

1. Diawali oleh keinginan untuk merencanakan yang diikuti dengan pengerahan tenaga untuk pengumpulan data serta menganalisisnya, sehingga diperoleh rumusan yang disepakati.
2. Menetapkan strategis mengikuti sistem, organisasi dan mekanisme yang relevan dengan pelaksanaan.
3. Membandingkannya dengan sasaran atau keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan ketersediaan sumber daya.
4. Mengintegrasikan rencana tindakan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.
5. Implementasi berdasarkan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi dan peningkatan kualitas sumber daya.

Berikut tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kabupaten Nunukan, yang dituangkan dalam tabel T-C.32.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Nunukan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintahan daerah	100	
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Nunukan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100	
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kabupaten Nunukan	Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulangan Bencana	100	
B	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	SPM/LPPD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Nunukan	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	SPM/LPPD
2	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	50	SPM/LPPD
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Nunukan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30	SPM/LPPD
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota (NON SPM)	Kabupaten Nunukan		0	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	10	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	SPM/LPPD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota	0	SPM/LPPD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	SPM/LPPD
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40	SPM/LPPD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Nunukan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	SPM/LPPD
3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10	SPM/LPPD
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1	SPM/LPPD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Nunukan	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	SPM/LPPD
4	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	SPM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	30	SPM
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	SPM
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah perencanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Nunukan disusun dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program, kegiatan, dan Sub Kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Kebijakan Nasional yang mendukung program kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, pada Prioritas Nasional (PN) ke-6 yaitu : **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Berasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, pada Prioritas Nasional (PN) ke-6, BPBD Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran yaitu: **Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Tangguh Bencana dengan Strategi Melalui Penyelenggaraan Internalisasi Prioritas Penanggulangan Bencana.**

Indikator dari sasaran BPBD Kabupaten Nunukan adalah **Persentase Indeks Prioritas Bencana.** Nilai persentase indeks prioritas bencana ini didapat melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Target tahunan dari sasaran pertama ini ditetapkan untuk periode tahun dengan rata-rata capaian meningkat tiap tahunnya. Penentuan target menggunakan angka capaian pada akhir periode sebelumnya sebagai acuan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa persentase indeks prioritas bencana tiap tahunnya ditargetkan untuk terus meningkat, atau dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Nunukan setiap tahunnya harus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Kebijakan perlu diambil dalam meningkatkan ketahanan daerah antara lain :

1. Menurunkan indeks risiko bencana dengan strategi melalui prioritas internalisasi aksi penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak bencana.
2. Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Tangguh terhadap Bencana yang Berkorelasi dengan upaya penanggulangan bencana melalui internalisasi aksi semua bidang teknis dalam kebencanaan.

Melalui kebijakan tersebut, Peningkatan Kapasitas Daerah dalam hal ini Indeks Ketahanan Daerah dapat dicapai dengan beberapa strategi yang perlu ditempuh, antara lainnya :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;

2. Penyediaan Bahan Logistik
3. Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
4. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
7. Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
8. Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota
9. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
10. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
11. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah:

- a. Terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan tertib.
- b. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak bencana.

2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah:

- a. Meningkatnya rasa aman dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat.
- b. Menwujudkan Kabupaten yang tangguh bencana dengan strategis melalui peyelenggaraan internalisasi prioritas pengurangan resiko bencana.
- c. Meningkatkan internalisasi aksi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- d. Meningkatkan internalisasi aksi bidang kedaruratan, logistik, dan peralatan penanggulangan bencana.
- e. Meningkatkan internalisasi aksi bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:

a. Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah

BPBD Kabupaten Nunukan dalam rangka mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Nunukan, terutama **Misi Keempat**,

Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Dengan Mengedepankan Supremasi Hukum, walaupun sasaran BPBD Kabupaten Nunukan hanya mengampu pada satu sasaran yang menjadi prioritas Satuan Kerja Polisi Pamong Praja yaitu **Meningkatnya Rasa Aman dan Kepatuhan Terhadap Hukum di Masyarakat**, BPBD Kabupaten Nunukan tetap akan melaksanakan tanggungjawab utamanya yaitu **menurunkan risiko bencana** melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

b. Pencapaian SPM

Sebagai bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPBD Kabupaten Nunukan adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ini menjelaskan tentang ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. SPM ini terdiri dari :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana,
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

i. Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- a. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan untuk tahun 2025 terdiri dari 2 Program yaitu :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Penanggulangan Bencana
- b. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan untuk tahun 2025 terdiri dari Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Perangkat Daerah
 - 7) Pelayanan Informasi dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 - 8) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 - 9) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 10) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- c. Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan untuk tahun 2025 terdiri dari Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 7) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
 - 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 11) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 13) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 14) Pengadaan Mebel
 - 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
 - 20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/kota
 - 21) Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 22) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 23) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 24) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - 25) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 26) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - 27) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota

- 28) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 29) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 30) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 31) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 32) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - 33) Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota
 - 34) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Nunukan
 - 35) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - 36) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
 - 37) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 38) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 39) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - 40) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - 41) *Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah rawan Bencana Lintas Kab/Kota*
 - 42) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 43) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
 - 44) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.
- d. Sifat penyebaran lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah di wilayah Kabupaten Nunukan.
- e. Kebutuhan dana/pagu indikatif Tahun 2025
- Kebutuhan dana pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2025
Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.341.069.984
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	8.664.536.915
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	162.626.770
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	1	82.462.070
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Nunukan	1	14.989.750
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Nunukan	1	13.030.950
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	1	26.764.000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	1	25.380.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	5.285.254.994
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	14	5.276.554.694
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	1	8.700.300
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	834.905.664
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	5	419.820.497
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	12	165.435.667
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	12	49.549.500
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	25	200.100.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	563.019.031
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nunukan	5	199.744.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5	6
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Nunukan	15	139.274.531
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	1	224.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.428.057.056
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	12	127.754.736
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Nunukan	12	1.300.302.320
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	390.673.400
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Nunukan	18	351.143.400
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	3	39.530.000
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	0	-
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100	6.676.533.069
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	75.042.437
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Nunukan	60	75.042.437
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	0	-
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	5.038.342.915
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	178.951.805
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	100	3.713.135.000
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Nunukan	50	28.990.500
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Nunukan	30	73.818.370
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Nunukan	1	53.322.750
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	10	52.990.000
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	350.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5	6
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Nunukan	0	-
1.05.03.2.02.0026	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kabupaten Nunukan	1	505.422.330
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	0	-
1.05.03.2.02.0028	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kabupaten Nunukan	40	81.712.160
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	823.922.730
1.05.03.2.03.0002	<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kabupaten Nunukan	3	106.362.000
1.05.03.2.03.0003	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kabupaten Nunukan	10	195.460.000
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	73.676.160
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	60	102.703.810
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	8	293.080.600
1.05.03.2.03.0012	<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	Kabupaten Nunukan	3	52.640.160
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100	739.224.987
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	40.330.000
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	40.000.000
1.05.03.2.04.0004	<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</i>	Kabupaten Nunukan	0	-
1.05.03.2.04.0005	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	Kabupaten Nunukan	0	-
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	30	170.558.270
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	15	54.167.310
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	42.801.000
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha	Kabupaten Nunukan	1	94.767.697

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5	6
	dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.04.0012	<i>Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota</i>	Kabupaten Nunukan	1	78.942.630
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	129.754.710
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Nunukan	1	83.798.220
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	1	4.105.150

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN
MAJU TAHUN 2026

A. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Berdasarkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyajian Renja Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 terdapat perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana tertunag dalam Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.341.069.984				5.886.065.472
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana		100	8.664.536.915			100	4.112.083.272
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		100	162.626.770			100	30.000.000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	1	82.462.070	Dana Alokasi Umum		1	30.000.000
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Nunukan	1	14.989.750	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Nunukan	1	13.030.950	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kabupaten Nunukan	1	26.764.000	Dana Alokasi Umum		0	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	1	25.380.000	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah		100	5.285.254.994			100	2.927.112.172
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	14	5.276.554.694	Dana Alokasi Umum		14	2.927.112.172
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	1	8.700.300	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah		100	834.905.664			100	123.000.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	5	419.820.497	Dana Alokasi Umum		5	8.000.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12	165.435.667	Dana Alokasi Umum		12	30.000.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12	49.549.500	Dana Alokasi Umum		12	5.000.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	25	200.100.000	Dana Alokasi Umum		25	80.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100	563.019.031			100	82.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	5	199.744.500	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	15	139.274.531	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1	224.000.000	Dana Alokasi Umum		1	82.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100	1.428.057.056			100	819.971.100
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12	127.754.736	Dana Alokasi Umum		12	90.000.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12	1.300.302.320	Dana Alokasi Umum		12	729.971.100
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100	390.673.400			100	130.000.000
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Nunukan	18	351.143.400	Dana Alokasi Umum		18	110.000.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Nunukan	3	39.530.000	Dana Alokasi Umum		3	10.000.000
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Nunukan	0	-	Dana Alokasi Umum		1	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulangan Bencana		100	6.676.533.069			100	1.773.982.200
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi rawan bencana		100	75.042.437			100	60.000.000
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kabupaten Nunukan	60	75.042.437	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	60	60.000.000
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Nunukan	0	-	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	0	-
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	5.038.342.915			100	1.458.737.000
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kabupaten Nunukan	1	178.951.805	Dana Alokasi Umum		1	528.045.000
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Nunukan	100	3.713.135.000	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	0	-
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	50	28.990.500	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	50	51.557.000
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Nunukan	30	73.818.370	Dana Alokasi Umum		0	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kabupaten Nunukan	1	53.322.750	Dana Alokasi Umum		1	60.000.000
1.05.03.2.02.0021	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	Kabupaten Nunukan	10	52.990.000	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	10	60.000.000
1.05.03.2.02.0022	<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	Kabupaten Nunukan	1	350.000.000	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	1	60.000.000
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Nunukan	0	-	Dana Alokasi Umum		1	50.000.000
1.05.03.2.02.0026	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	Kabupaten Nunukan	1	505.422.330	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	1	528.045.000
1.05.03.2.02.0027	<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	Kabupaten Nunukan	0	-	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	0	-
1.05.03.2.02.0028	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	Kabupaten Nunukan	40	81.712.160	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	40	121.090.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	823.922.730			100	190.245.200
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kabupaten Nunukan	3	106.362.000	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	0	-
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kabupaten Nunukan	10	195.460.000	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	10	60.000.000
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kabupaten Nunukan	1	73.676.160	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kabupaten Nunukan	60	102.703.810	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Nunukan	8	293.080.600	Dana Alokasi Umum		10	130.245.200
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	3	52.640.160	Dana Alokasi Umum	SPM/ LPPD	0	-
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100	739.224.987			100	65.000.000
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Nunukan	1	40.330.000	Dana Alokasi Umum		1	25.000.000
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Nunukan	1	40.000.000	Dana Alokasi Umum		1	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kabupaten Nunukan	0	-	Dana Alokasi Umum	SPM	0	-
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Nunukan	0	-	Dana Alokasi Umum	SPM	0	-
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kabupaten Nunukan	30	170.558.270	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kabupaten Nunukan	15	54.167.310	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kabupaten Nunukan	1	42.801.000	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Kabupaten Nunukan	1	94.767.697	Dana Alokasi Umum		0	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kabupaten Nunukan	1	78.942.630	Dana Alokasi Umum	SPM	0	-
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Nunukan	1	129.754.710	Dana Alokasi Umum		1	20.000.000
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Nunukan	1	83.798.220	Dana Alokasi Umum		0	-
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Nunukan	1	4.105.150	Dana Alokasi Umum		0	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan praakiraan maju Tahun 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan baik yang saat ini maupun yang akan datang.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan dalam membentuk suatu program kinerja yang merupakan kesinambungan langsung dari Rencana Strategis, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan segala permasalahan yang sering terjadi di dalam maupun di luar Kabupaten Nunukan yang bersangkutan langsung dengan penanggulangan bencana dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut tentunya dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun berdasarkan permasalahan yang sering terjadi di wilayah pedalaman yang berada di seluruh Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Kepada semua yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Kami juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, segala masukan dari unsur instansi lain dan seluruh komponen masyarakat sangat kami harapkan sebagai bahan untuk pembentukan suatu Rencana Kerja yang tepat dan mempunyai fungsi besar dalam mengaplikasikan wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya sehingga sasaran dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui mitigasi bencana dapat tercapai.